



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

LAPORAN

HASIL ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN PETA JABATAN PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Oleh :

Ni Kadek Erawati, S.STP., M.Si
Analisis Kebijakan Ahli Muda

TAHUN 2024

PENDAHULUAN

Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Peta Jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan ini disusun untuk memberikan dasar yang jelas dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier ASN, serta penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Badung.

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Manfaat penyusunan Anjab, ABK dan Peta Jabatan:

1. Menentukan kebutuhan riil pegawai berdasarkan tugas dan fungsi organisasi, sehingga jumlah dan kualifikasi pegawai sesuai dengan beban kerja yang ada.
2. Menghindari ketidakseimbangan distribusi pegawai, baik kelebihan maupun kekurangan ASN pada unit kerja tertentu.
3. Menyediakan informasi jabatan yang terukur mengenai uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Menjadi dasar penyusunan kebijakan manajemen ASN, termasuk perencanaan formasi, rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan kompetensi.
5. Mendukung penyederhanaan birokrasi, khususnya melalui penguatan jabatan fungsional dan efisiensi tata kerja organisasi perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Anjab, ABK dan Peta Jabatan:

1. Menyediakan data dan informasi jabatan secara akurat dan terukur.
2. Menentukan jumlah kebutuhan ASN pada setiap perangkat daerah berdasarkan beban kerja riil.
3. Menyusun peta jabatan sebagai dasar perencanaan karier, mutasi, dan promosi.
4. Mendukung upaya penataan kelembagaan dan peningkatan efektivitas birokrasi di Kabupaten Badung.

Urgensi penyusunan Anjab dan ABK semakin tinggi karena Pemerintah Kabupaten Badung dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan adaptif terhadap perubahan. Tanpa adanya perencanaan kebutuhan ASN yang berbasis pada analisis jabatan dan beban kerja, maka kinerja birokrasi akan terhambat oleh ketidaktepatan jumlah, kualitas, serta distribusi pegawai.

Penyusunan Anjab, ABK, dan Peta Jabatan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
4. PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubahn dengan Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

6. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah beserta perubahannya.

Dengan demikian, penyusunan Anjab, ABK, dan Peta Jabatan di Kabupaten Badung merupakan kebutuhan yang mendesak sekaligus amanat regulasi, untuk menjamin tersedianya data dan informasi jabatan yang akurat sebagai dasar kebijakan manajemen ASN.

PROSES PENYUSUNAN DATA

1. Pengumpulan Data

- Melakukan penelaahan dokumen perangkat daerah baik berupa tugas dan fungsi, hasil kerja dan beban kerja.

2. Analisis Jabatan (Anjab)

- Melakukan identifikasi nama jabatan.
- Uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hasil kerja.
- Bahan kerja, perangkat kerja, serta kondisi jabatan.
- Kompetensi jabatan (pendidikan, keterampilan, pengalaman).

3. Analisis Beban Kerja (ABK)

- Perhitungan beban kerja berdasarkan volume pekerjaan.
- Penetapan norma waktu dan standar kerja.
- Perhitungan kebutuhan pegawai optimal.

4. Penyusunan Peta Jabatan

- Struktur organisasi perangkat daerah.
- Hirarki jabatan struktural dan fungsional.
- Jumlah dan sebaran pegawai berdasarkan unit kerja.

HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN

- A. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Informasi jabatan terdiri dari:
- a. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.
 - b. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.
 - c. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
 - d. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
 - e. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 - f. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
 - g. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
 - h. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.

- i. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
- j. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-seginya.
- k. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
- l. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya.

Telah disusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebanyak 37 dokumen dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 825/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

B. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Telah disusun Dokumen Peta Jabatan sebanyak 40 dokumen (37 Perangkat Daerah dan 3 Rumah Sakit) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Badung Nomor 826/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Sekretariat Daerah
2. Keputusan Bupati Badung Nomor 827/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Keputusan Bupati Badung Nomor 828/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Inspektorat
4. Keputusan Bupati Badung Nomor 847/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Keputusan Bupati Badung Nomor 844/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6. Keputusan Bupati Badung Nomor 839/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
7. Keputusan Bupati Badung Nomor 848/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 831/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Kebudayaan
9. Keputusan Bupati Badung Nomor 841/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Kesehatan
10. Keputusan Bupati Badung Nomor 837/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
11. Keputusan Bupati Badung Nomor 834/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
12. Keputusan Bupati Badung Nomor 830/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

13. Keputusan Bupati Badung Nomor 838/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
14. Keputusan Bupati Badung Nomor 829/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Pariwisata
15. Keputusan Bupati Badung Nomor 835/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
16. Keputusan Bupati Badung Nomor 846/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Perhubungan
17. Keputusan Bupati Badung Nomor 845/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Perikanan
18. Keputusan Bupati Badung Nomor 833/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
19. Keputusan Bupati Badung Nomor 849/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 836/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan
21. Keputusan Bupati Badung Nomor 843/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
22. Keputusan Bupati Badung Nomor 842/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Sosial
23. Keputusan Bupati Badung Nomor 832/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

24. Keputusan Bupati Badung Nomor 840/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja
25. Keputusan Bupati Badung Nomor 856/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
26. Keputusan Bupati Badung Nomor 851/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Badan Pendapatan Daerah
27. Keputusan Bupati Badung Nomor 850/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28. Keputusan Bupati Badung Nomor 852/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Keputusan Bupati Badung Nomor 855/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Keputusan Bupati Badung Nomor 853/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
31. Keputusan Bupati Badung Nomor 854/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah
32. Keputusan Bupati Badung Nomor 861/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Kecamatan Abiansemal
33. Keputusan Bupati Badung Nomor 864/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Kecamatan Kuta
34. Keputusan Bupati Badung Nomor 865/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Kecamatan Kuta Selatan
35. Keputusan Bupati Badung Nomor 863/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Kecamatan Kuta Utara

36. Keputusan Bupati Badung Nomor 862/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Kecamatan Mengwi
37. Keputusan Bupati Badung Nomor 860/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Kecamatan Petang
38. Keputusan Bupati Badung Nomor 857/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
39. Keputusan Bupati Badung Nomor 859/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Giri Asih
40. Keputusan Bupati Badung Nomor 858/01/Hk/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Suwiti

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian antara Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Hasil pelaksanaan Anjab dan ABK menunjukkan bahwa sebagian besar jabatan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan fungsi unit kerja masing-masing. Struktur jabatan telah menggambarkan peran dan tanggung jawab yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Namun demikian, hasil analisis juga mengungkapkan adanya beberapa jabatan dengan tingkat beban kerja yang relatif rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Adanya tugas yang bersifat rutin dan administratif tanpa variasi tanggung jawab yang signifikan, sehingga volume kerja tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang menempati jabatan tersebut.

- Perubahan regulasi dan kebijakan yang mengalihkan sebagian kewenangan ke tingkat pemerintah provinsi atau pusat, sehingga mengurangi lingkup pekerjaan pada jabatan tertentu.
- Pemanfaatan teknologi informasi yang meningkatkan efisiensi, tetapi belum diikuti dengan penyesuaian formasi jabatan.

Selain itu, ditemukan bahwa beberapa jabatan fungsional belum terisi secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan jabatan fungsional menjadi kendala utama. Sebagai contoh, jabatan fungsional perencana, dan analis kebijakan masih belum terisi sesuai kebutuhan ideal. Hal ini mengakibatkan beban kerja pegawai yang telah menempati jabatan tersebut menjadi tidak seimbang, serta berpotensi menurunkan kualitas keluaran kerja (output) unit organisasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterpaduan antara hasil Anjab dan ABK perlu terus diperkuat agar dapat menjadi dasar yang akurat dalam penataan kelembagaan, pengembangan karier, serta penyusunan formasi ASN yang lebih proporsional.

2. Kesenjangan pegawai

Analisis beban kerja juga mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan jumlah dan kualifikasi pegawai antar jenis jabatan dan unit kerja. Terdapat kekurangan tenaga pada bidang-bidang teknis seperti:

- Teknologi Informasi (IT): dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik, pengelolaan data, dan sistem informasi pemerintahan.
- Perencana: diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan terintegrasi.
- Auditor dan Pengawas: penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- Tenaga Kesehatan: terutama di fasilitas pelayanan dasar, seperti puskesmas dan rumah sakit daerah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

Sebaliknya, ditemukan kelebihan pegawai pada jabatan pengadministrasi perkantoran yang tugasnya cenderung bersifat rutin dan berulang. Kelebihan ini menunjukkan perlunya reorientasi dan redistribusi pegawai agar sesuai dengan kebutuhan strategis daerah.

Fenomena kesenjangan ini juga menandakan bahwa pola rekrutmen ASN di masa lalu belum sepenuhnya berbasis kebutuhan nyata organisasi. Oleh karena itu, hasil ABK menjadi penting sebagai dasar penyusunan formasi ASN ke depan yang lebih berbasis pada evidence (data kebutuhan nyata).

3. Implikasi terhadap Kinerja Perangkat Daerah

Kondisi ketidakseimbangan jumlah dan sebaran pegawai memiliki dampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Unit kerja yang mengalami kekurangan tenaga teknis seringkali tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan secara optimal, sehingga target kinerja perangkat daerah tidak tercapai secara penuh. Sebaliknya, unit kerja dengan kelebihan pegawai berpotensi menghadapi penurunan produktivitas, karena beban kerja tidak merata di antara pegawai.

Implikasi lebih lanjut adalah penurunan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat akibat ketidakseimbangan kapasitas antar bidang. Hal ini juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Untuk mengatasi hal tersebut, peta jabatan hasil analisis jabatan dan beban kerja dapat dijadikan dasar strategis dalam:

- Redistribusi pegawai antar perangkat daerah atau unit kerja, agar beban kerja lebih seimbang dan sesuai kebutuhan riil.
- Perencanaan rekrutmen ASN baru, dengan memperhatikan bidang-bidang prioritas yang masih kekurangan SDM.

- Penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, khususnya dalam mengisi jabatan fungsional yang masih belum optimal.

Dengan demikian, hasil Anjab dan ABK tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat manajerial dan strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi serta efektivitas birokrasi daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Penyusunan Anjab, ABK, dan Peta Jabatan telah memberikan gambaran komprehensif mengenai kebutuhan pegawai di Kabupaten Badung.
2. Terdapat selisih antara jumlah pegawai yang ada dengan kebutuhan riil berdasarkan beban kerja.
3. Peta Jabatan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan formasi ASN, pengembangan karier, serta penataan kelembagaan.

REKOMENDASI

1. Optimalisasi Redistribusi Pegawai untuk menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan pegawai antar perangkat daerah.
2. Penguatan Jabatan Fungsional melalui pengembangan kompetensi ASN.
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi untuk pemantauan beban kerja secara dinamis.
4. Perencanaan Formasi ASN yang Tepat dengan memperhatikan hasil ABK dan kebutuhan strategis daerah.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap implementasi peta jabatan agar tetap sesuai dengan perkembangan organisasi dan tuntutan pelayanan publik.